



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PANITIA SELEKSI INSTANSI DAERAH PENGADAAN PPPK

Jalan Sutan Syahrir No.14, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112
Telepon (0532) 21045 Laman bkd.kotawaringinbaratkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/3334/BKPSDM.III/2023

TENTANG

PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK PADA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah Pengadaan PPPK Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800.1.2.2/3333/BKPSDM.III/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. JADWAL DAN TATA CARA PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah Pengadaan PPPK Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800.1.2.2/3333/BKPSDM.III/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023, wajib mengikuti **pemberkasan usul penetapan Nomor Induk PPPK secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing peserta mulai dari tanggal 16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen **ASLI** secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing peserta.
2. Dokumen persyaratan usul Nomor Induk PPPK dipindai/ *scan* menggunakan mesin *scanner* (**bukan aplikasi scan HP**) dari dokumen asli, utuh, jelas dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN.
3. Isian di berkas persyaratan tidak boleh ada coretan atau *tipe-x*, jika ada kekeliruan agar diganti isi/tulis ulang.
4. Ketentuan dokumen yang diunggah adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**.
5. Contoh format Surat Pernyataan dan Surat Lamaran adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**.
6. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai ketentuan dalam aplikasi SSCASN.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK

Dokumen yang wajib diunggah secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing peserta adalah **dokumen ASLI dalam bentuk pindai (scan)** yang terdiri atas :

1. Pas photo terbaru menggunakan pakaian formal (**kemeja putih dan dasi hitam, bagi yang menggunakan jilbab agar menggunakan jilbab warna hitam**) dengan latar belakang berwarna merah (dalam format JPG/JPEG).

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



2. Ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan (dalam format PDF).
3. Transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan (dalam format PDF).
4. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi dan diunduh melalui akun SSCASN masing-masing peserta, ditanda tangani oleh yang bersangkutan di atas meterai 10.000 (dalam format PDF).
5. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditanda tangani oleh peserta yang bersangkutan di atas meterai 10.000, yang berisi tentang (dalam format PDF):
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai BUMN/BUMD;
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
 - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (dalam format PDF).
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah (dalam format PDF).
8. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditanda tangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (dalam format PDF).
9. Surat lamaran yang ditujukan kepada Pj. Bupati Kotawaringin Barat dengan format sebagaimana terlampir (dalam format PDF).

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap **mengundurkan diri**.
2. Peserta yang lulus seleksi kompetensi dan akan melakukan pemberkasan, **wajib bergabung dalam WhatsApp Group** melalui link : <https://s.id/UsulNIP3KGuru2023> untuk mendapatkan penjelasan dan/atau tanya jawab terkait pemberkasan usul penetapan Nomor Induk PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru.
3. **Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan/data yang tidak benar/tidak sesuai/menyalahi ketentuan, baik pada tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berhak membatalkan keikutsertaan pelamar/peserta pada tahapan seleksi dan/atau memberhentikan sebagai PPPK dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwenang.**
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI PPPK dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Peserta diwajibkan selalu mengikuti perkembangan informasi Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 melalui :

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



- a. Website SSCASN : <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b. Website BKPSDM Kab. Kotawaringin Barat :
<https://bkd.kotawaringinbaratkab.go.id>
 - c. Instagram BKPSDM Kab. Kotawaringin Barat : @bkpsdmkobar
6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023 **tidak dipungut biaya**.
 7. Apabila terdapat kekeliruan dalam Pengumuman ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pangkalan Bun, 22 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plh. Sekretaris Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat

Selaku

Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah
Pengadaan PPPK



Juni Gultom

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PPPK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR : 800.1.2.2/3334/BKPSDM.III/2023

TANGGAL : 22 DESEMBER 2023

TENTANG PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK PADA PENGADAAN PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

**KELENGKAPAN DOKUMEN ASLI DALAM BENTUK PINDAI (SCAN)
 YANG WAJIB DIUNGGAH (UPLOAD) KE SSCASN**

NO	PERSYARATAN	TIPE FILE	KETERANGAN
1	Pas Photo terbaru menggunakan pakaian formal (kemeja putih dan dasi hitam) dengan latar belakang berwarna merah	jpg/ jpeg	a. Pas photo terbaru. b. Menggunakan kemeja putih dan dasi hitam. Bagi yang menggunakan jilbab, agar menggunakan jilbab warna hitam. c. Latar belakang berwarna merah. d. Merupakan hasil foto studio.
2	ASLI Ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan	pdf	Ijazah yang digunakan untuk melamar jabatan.
3	ASLI Transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan	pdf	Transkrip nilai yang digunakan untuk melamar jabatan.
4	ASLI Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi dan diunduh melalui akun SSCASN, ditanda tangani di atas meterai 10.000	pdf	a. Diinput secara online melalui akun SSCASN. b. Hasil isian diunduh, dicetak dan <u>ditulis tangan menggunakan huruf balok tinta hitam pada kolom nama, tempat lahir dan tanggal lahir.</u> c. Ditanda tangani di atas meterai 10.000. d. DRH yang telah ditanda tangani, wajib discan/pindai dengan <i>multipage</i> /gabung antara DRH Perorangan dan DRH Riwayat menjadi 1 (satu) file.
5	ASLI Surat pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditanda tangani di atas meterai 10.000	pdf	a. Format surat pernyataan terlampir. b. Surat pernyataan diketik dan dicetak. c. Surat pernyataan yang telah dicetak, ditanda tangani di atas meterai 10.000
6	ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia	pdf	Keterangan peruntukan pada SKCK diisi : Persyaratan Usul Penetapan NI PPPK.
7	ASLI Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah	pdf	a. Ditanda tangani oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah. b. Keterangan peruntukan pada Surat diisi : Persyaratan Usul Penetapan NI PPPK.
8	ASLI Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditanda tangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud	pdf	a. Ditanda tangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. b. Keterangan peruntukan pada Surat diisi : Persyaratan Usul Penetapan NI PPPK.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



9	ASLI Surat lamaran yang ditujukan kepada Pj. Bupati Kotawaringin Barat yang telah ditanda tangani di atas meterai 10.000	pdf	a. Format surat lamaran terlampir. b. Surat lamaran diketik dan dicetak. c. Surat lamaran yang telah dicetak, ditanda tangani di atas meterai 10.000
---	---	-----	--

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**

LAMPIRAN II

PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PPPK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 800.1.2.2/3334/BKPSDM.III/2023

TANGGAL : 22 DESEMBER 2023

TENTANG PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK PADA PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai BUMN/BUMD;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia bersedia dituntut di Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Pangkalan Bun, 2023

Pelamar
Materai
Rp.10.000,- *ditanda tangani*
(Nama Lengkap)

SURAT LAMARAN

.....,2023

Kepada
Yth. Pj. Bupati Kotawaringin Barat
di -
PANGKALAN BUN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Formasi yang dilamar :
 Jabatan :
 Unit kerja penempatan :
Alamat sesuai KTP :
Nomor *Hand Phone* :

dengan ini mengajukan permohonan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen asli yang diunggah melalui *website* : <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut :

1. Pas photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
2. Ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
3. Transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
4. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi dan diunduh melalui akun SSCASN, ditanda tangani di atas meterai 10.000;
5. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditanda tangani di atas meterai 10.000;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan teknis pemerintah;
8. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditanda tangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

Adapun seluruh data dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023.

Demikian saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Materai Rp.10.000, <i>ditanda tangani</i> (Nama Lengkap)	Pelamar
--	---------